



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIAT DAERAH
Jalan Raya El Tari Nomor 52 Telepon 0380 - 833341, 829283
KUPANG

Kupang, 28 Juli 2025

Kepada
Yth. PPK RSUD Prof. Dr. W.Z. Johannes
Kupang

di-
Kupang

SURAT PENGANTAR

Nomor : 000.355/8/BPBJ. 1

No	Jenis Surat/Naskah	Banyaknya	Keterangan
1.	Dokumen Hasil Tender paket Pekerjaan Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor (Renovasi Gedung-Renovasi Ruang IGD menjadi Ruang Tim Layanan Jaminan Kesehatan Terpadu)	1 Dokumen	Disampaikan dengan hormat untuk diproses lebih lanjut.

Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa
Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur,

ADELINO DA CRUZ SOARES, AKS, MPS.Sp

Pembina Tingkat I

NIP. 19750308 199903 1 004

Paraf Hierarki		
1	Kepala Bagian Pengelolaan PBJ	
2	Fungsional PBJ Ahli Madya	
3	Kelompok Kerja Pemilihan	

Barang / Surat tersebut diatas telah

Diterima Oleh

Nama

Jabatan

Tanggal

Dalam Keadaan

Tanda Tangan

: Agripa kamengon
: Pejabat Pembuat Komitmen
: 29 juli 2025
: Adhinar

Catatan :

Setelah ditandatangani surat pengantar ini harap dikirim kembali

KELOMPOK KERJA BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
GEDUNG SASANDO - KANTOR GUBERNUR lantai 3
Jl. El Tari Nomor. 52 Kupang
Tlp. (0380) 833341 Fax. (0380) 829283. Email : pokmil.birobjntt@gmail.com

Nomor : 09/PK-Tender/Gedung/IGD-RSUD/VII/2025

Lampiran : 1 (satu) Berkas

Perihal : Hasil Tender

Kupang, 28 Juli 2025

Kepada

Yth. Kepala Biro Pengadaan Barang/Jasa

Setda Prov. NTT

di-

Kupang

Menindaklanjuti Surat Perintah Tugas Kepala Biro Pengadaan Barang/Jasa Setda Provinsi NTT dengan Nomor 800.1.11.1/9/BPBJ.1/2025 tanggal 12 Juni 2025 tentang penunjukan pokja pemilihan untuk paket pekerjaan Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor (Renovasi Gedung-Renovasi Ruang IGD menjadi Ruang Tim Layanan Jaminan Kesehatan Terpadu), maka dengan ini disampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Kelompok kerja (pokja) pemilihan telah melakukan Pemilihan Penyedia dengan hasil sebagai berikut:

Kode paket : 10043829000

Nama Paket : Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor (Renovasi Gedung-Renovasi HPS

HPS : Rp. 409.000.000,00

Pemenang : CV. SAMJAYA MANDIRI

NPWP : 00.321.523.5-7009.000

Alamat : Jl. Merbabu No. 18 Lt. 1A, Kel. Cibubur, Kec. Ciracas-Jakarta Timur

Nilai Penawaran : Rp398.629.860,00

Nilai Hasil Negosiasi : Rp398.629.860,00
2. Sehubungan dengan point (1) diatas, maka dengan ini terlampir disampaikan berkas hasil proses tender paket pekerjaan tersebut.
3. Berita Acara Pemberian Penjelasan, Berita Acara Evaluasi Penawaran dan Berita Acara Hasil Pemilihan serta Summary Lelang dapat dilihat pada aplikasi PPK.
4. PPK dapat membuka dan melihat hasil proses pemilihan penyedia yang dilakukan oleh pokja melalui aplikasi SPSE. (Gunakan user PPK).
5. Sesuai regulasi, dan aplikasi SPSE v4.5, PPK berkewajiban melakukan login ke SPSE untuk melakukan pembuatan e-kontrak pada SPSE Provinsi NTT (Sesuai jadwal SPPBJ dan Pembuatan Kontrak pada paket tersebut).

Demikian berkas ini disampaikan, untuk ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku.

Kelompok Kerja (Pokja) Pemilihan

Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor (Renovasi Gedung-Renovasi Ruang IGD menjadi Ruang Tim Layanan Jaminan Kesehatan Terpadu)

No	POKJA	TTD
1.	<u>Anwar Harijana, S.Si.</u> NIP. 19710309 199803 1 006	
2.	<u>Boby L. Da Costa, S.Kom., M.M.</u> NIP. 19801113 201001 1 020	
3.	<u>Yustin Elvry Toka, S.T.</u> NIP. 19700122 200701 2 015	
4.	<u>Kornelis Kopong Bolen, S.E., M.Ak.</u> NIP.19750228 200904 1 003	
5.	<u>Rivantus Foyh, S.Kom.</u> NIP.19820104 201502 1 001	

KELOMPOK KERJA BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
GEDUNG SASANDO - KANTOR GUBERNUR lantai 3
Jl. El Tari Nomor. 52 Kupang
Tlp. (0380) 833341 Fax. (0380) 829283. Email : pokmil.birobjntt@gmail.com

BERITA ACARA PENETAPAN PEMENANG
Nomor : 06/PK-Tender/Gedung/IGD-RSUD/VII/2025

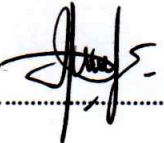
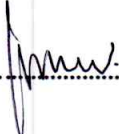
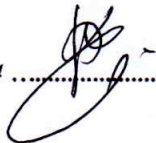
Pada Hari ini Rabu tanggal Dua Puluh Tiga bulan Juli tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima telah dilakukan Rapat Pembahasan Penetapan Pemenang untuk paket pengadaan: Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor (Renovasi Gedung-Renovasi Ruang IGD menjadi Ruang Tim Layanan Jaminan Kesehatan Terpadu) sebagai berikut :

Kode Tender : 10043829000
Nama Paket : Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor (Renovasi Gedung-Renovasi Ruang IGD menjadi Ruang Tim Layanan Jaminan Kesehatan Terpadu)
Pagu Anggaran : Rp. 473.400.000,00
Nilai Total HPS : Rp. 409.000.000,00
Sumber Dana : APBD
SKPD / OPD : Rumah Sakit Umum Daerah Prof Dr W Z Johannes Kupang
Metoda Pemilihan : Tender - Pascakualifikasi Satu File
Metoda Evaluasi Penawaran : Harga Terendah Sistem Gugur

1 Pemenang
Nama Peserta : CV. SAMJAYA MANDIRI
Alamat : Jl. Merbabu No. 18 Lt. 1A, Kel. Cibubur, Kec. Ciracas-Jakarta Timur
NPWP : 00.321.523.5-7009.000
Harga Penawaran : 398.629.860,00
Harga Penawaran Negosiasi : 398.629.860,00

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

KELOMPOK KERJA (POKJA) PEMILIHAN
BELANJA MODAL BANGUNAN GEDUNG KANTOR (RENOVASI GEDUNG-RENOVASI RUANG IGD MENJADI RUANG TIM LAYANAN JAMINAN KESEHATAN TERPADU)

NO	NAMA	TTD
1.	<u>Anwar Harijana, S.Si.</u> NIP.19710309 199803 1 006	1 
2.	<u>Boby L. Da Costa, S.Kom., M.M.</u> NIP.19801113 201001 1 020	2 
3.	<u>Yustin Elvry Toka, S.T.</u> NIP.19700122 200701 2 015	3 
4.	<u>Kornelis Kopong Bolen, S.E., M.Ak.</u> NIP.19750228 200904 1 003	4 
5.	<u>Rivantus Foyh, S.Kom.</u> NIP.19820104 201502 1 001	5 

KELOMPOK KERJA (POKJA) BIRO PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

Kantor Gubernur NTT Gedung Sasando Lt. 3
Jalan Raya El Tari No. 52, Telepon (0380) 833341 Fax. (0380) 829283
Kota Kupang - NTT

BERITA ACARA PEMBUKTIAN KUALIFIKASI

NOMOR : 05/PK-Tender/Gedung/IGD-RSUD/VII/2025
TANGGAL : 23 JULI 2025

Pada hari ini, Rabu tanggal Dua puluh tiga bulan Juli tahun Dua ribu dua puluh lima, bertempat di Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi NTT, kami yang bertanda tangan di bawah ini Pokja Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor (Renovasi Gedung-Renovasi Ruang IGD menjadi Ruang Tim Layanan Jaminan Kesehatan Terpadu), telah mengadakan Rapat Pembuktian Kualifikasi terhadap Dokumen Kualifikasi atas nama penyedia : CV. SAMJAYA MANDIRI untuk penyedia pekerjaan Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor (Renovasi Gedung-Renovasi Ruang IGD menjadi Ruang Tim Layanan Jaminan Kesehatan Terpadu) pada RSUD Prof. Dr. W.Z. Johannes Kupang dengan materi dan hasil Pembuktian Kualifikasi sebagai berikut :

No	Persyaratan Kualifikasi	Tunjuk Asli		Penilaian		Keterangan
		Ada	Tidak	Memenuhi	Tidak Memenuhi	
1	Landasan Hukum					
	A) Akta Pendirian Perusahaan	✓		✓		
	- Nomor 87-					
	- Tanggal 8 Feb 2012					
	B) Akta Perubahan Terakhir	✓		✓		
	- Nomor 01					
	- Tanggal 21 Maret 2024					
	C) NIB KBLI 43304	✓		✓		
	C) SBU KT007 / PB004	✓		✓		
	F) Kepesertaan BPJS	✓		✓		
	- Nomor					
	- Tanggal					
2	Data Keuangan					
	A) NPWP 02.215.225.7-009.000	✓		✓		
	B) Bukti Laporan Pajak Tahunan : Tahun 2024	✓		✓		
	- Nomor 31357306592253022601					
	- Tanggal 22 Maret 2025					

Paraf :

Paraf penyedia :

2

No	Persyaratan Kualifikasi	Tunjuk Asli		Penilaian		Keterangan
		Ada	Tidak	Memenuhi	Tidak Memenuhi	
3	Data Pengalaman Perusahaan 4 tahun terakhir	✓		✓		
	A) Kontrak Pengalaman dengan nilai					
	- Kontrak KSO (bila KSO)					
	- Pemberi Kerja					
	- Nama Paket Pekerjaan					
	- Tanggal Kontrak					
	- Nilai Paket Pekerjaan					
4	Data Pekerjaan yang sedang dikerjakan					
	A) Kontrak Pekerjaan					
	- Kontrak KSO (bila KSO)					
	- Pemberi Kerja					
	- Nama Paket Pekerjaan					
	- Tanggal Kontrak					
	- Nilai Paket Pekerjaan					
5	Data Peralatan					
	- Dump Truk 3 m3 2 Unit	✓		✓		
	- Genset 5 hp 1 Unit	✓		✓		
	- Mesin Las 2 Unit	✓		✓		
	- Scaffolding 50 set	✓		✓		
6	Data Personil					
	- Pelaksana Pekerjaan 1 orang	✓		✓		
	- Petugas K3 Konstruksi 1 orang	✓		✓		

Penyedia Jasa

Nama Perusahaan

: CV SAM JAYA

Nama Jelas/Jabatan

: FRANSISKUS x RICKY KASENETAN
Direktur Utama

Tanda Tangan/Cap perusahaan



Tanggapan penyedia jasa :

Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor (Renovasi Gedung-Renovasi Ruang IGD menjadi Ruang Tim Layanan Jaminan Kesehatan Terpadu)

1 Yustin E. Toka, ST
NIP.19700122 200701 2 015

1.

2 Boby L. Da Costa, S.Kom, MM
NIP. 19801113 201001 1 020

2.

3 Anwar Harijana, S.Si
NIP. 19710309 199803 1 006

3.

4 Kornelis K. Bolen, SE, M.Ak
NIP. 19750228 200904 1 003

4.

5 Rivantius Foyh, S.Kom
NIP. 19820104 201502 1 001

5.

DAFTAR HADIR PENYEDIA JASA

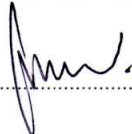
KEGIATAN/AGENDA : PEMBUKTIAN KUALIFIKASI
PAKET PEKERJAAN : Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor (Renovasi Gedung-Renovasi Ruang IGD menjadi Ruang Tim Layanan Jaminan Kesehatan Terpadu)
SATKER : RSUD Prof. Dr. W.Z. Johannes Kupang
LOKASI : RSUD Prof. Dr. W.Z. Johannes Kupang
SUMBER DANA : APBD
TAHUN ANGGARAN : 2025
HARI/TANGGAL : Rabu/23 Juli 2025

NO.	NAMA LENGKAP, JABATAN & NO. TELEPON/HP	NAMA PERUSAHAAN & ALAMAT/DOMISILI	TANDA TANGAN & CAP PERUSAHAAN
1	FRANSISKUS X RIDLEY KAJEMETAO DIREKTUR CABANG 085239027568	CV JAN JAYA Jl. CENDANA NO 3 FOUNTAIN, KUPANG - NTT	

POKJA

Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor (Renovasi Gedung-Renovasi Ruang IGD menjadi Ruang Tim Layanan Jaminan Kesehatan Terpadu)

- 1 Yustin E. Toka, ST
NIP.19700122 200701 2 015
- 2 Boby L. Da Costa, S.Kom, MM
NIP. 19801113 201001 1 020
- 3 Anwar Harijana, S.Si
NIP. 19710309 199803 1 006
- 4 Kornelis K. Bolen, SE, M.Ak
NIP. 19750228 200904 1 003
- 5 Rivantius Foyh, S.Kom
NIP. 19820104 201502 1 001

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

SISTEM PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK

Kepada Yth.

CV. SAMJAYA MANDIRI

di

Tempat

Kami mengundang Anda untuk menghadiri Pembuktian Kualifikasi terhadap Tender:

Kode Tender	10043829000
Nama Tender	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor (Renovasi Gedung-Renovasi Ruang IGD menjadi Ruang Tim Layanan Jaminan Kesehatan Terpadu)
dengan informasi terkait Klarifikasi sebagai berikut:	
Waktu	23 Juli 2025 09:30 s.d. 23 Juli 2025 11:00
Tempat	Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Prov. NTT Jl. Raya El Eltari No.52 Kupang
Yang harus dibawa	1.Undangan Pembuktian 2. Dokumen Kualifikasi Asli 3. Dokumen Teknis /Penawaran4. Cap/Stempel Perusahaan
Yang harus hadir	Direktur/Yang diwakilkan (Namanya Tercantum Dalam Akta Pendirian /Perubahan) dengan membawa identitas diri (KTP)

Demikian penjelasan kami, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat Kami,
Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor (Renovasi Gedung-Renovasi Ruang IGD
menjadi Ruang Tim Layanan Jaminan Kesehatan Terpadu)

Email ini dihasilkan secara otomatis, mohon untuk tidak membalas email ini.



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH
UNIT LAYANAN PENGADAAN (ULP) POKJA PEMILIHAN
Gedung Kantor Gubernur Sasando, Jalan El Tari No 50 Kupang – NTT

REVIEW PAKET PEKERJAAN KONSTRUKSI

Nomor : 01/PK-Tender/Gedung/IGD-RSUD/VII/2025
Tanggal : 14 Juli 2025

Paket Pekerjaan : Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor (Renovasi Gedung-Renovasi Ruang IGD menjadi Ruang Tim Layanan Jaminan Kesehatan Terpadu)
Ragu Anggaran : Rp. 473.400.000,00
Nilai HPS : Rp. 409.400.000,00
Lokasi Pekerjaan : RSUD Johannes Kupang – Kupang (Kota)
Instansi / CPT : RSUD Prof. Dr. W. Z. Johannes Kupang

Pada hari ini senin tanggal empat belas bulan juli tahun dua ribu dua puluh lima jam 13:00 sampai selesai yang bertanda tangan dibawah ini Pokja Pemilihan Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor (Renovasi Gedung-Renovasi Ruang IGD menjadi Ruang Tim Layanan Jaminan Kesehatan Terpadu) dan PPK RSUD Prof. Dr. W. Z. Johannes Kupang telah melakukan reviu bersama terhadap paket seperti tersebut diatas antara pokja pemilihan dan pejabat pembuat komitmen/ yang mewakili dengan hasil sebagai berikut :

A. REVIEW DOKUMEN PERSIAPAN PENGADAAN BARANG/JASA PPK

No	TAHAPAN	REVIU POKJA PEMILIHAN	PERTANYAAN POKJA KE PPK	REGULASI	PENDAPAT PPK
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)
I Memastikan Pencapaian Dokumen	A Memastikan bahwa PPK telah mengidentifikasi kompleksitas pekerjaan	Kriteria Pekerjaan Kompleks	1	Perpres 16 Tahun 2018 dan Perubahannya Perpres 12 Tahun 2021, Perpres 46 Tahun 2025, Perlem LKPP No 12 Tahun 2021	Pekerjaan ini tidak termasuk pekerjaan kompleks
		1 Memertikan teknologi tinggi			
		2 Mempunyai resiko tinggi			
		3 Menggunakan peralatan yang di desain khusus : dan /atau			
		4 Pekerjaan yang bernilai di atas Rp. 100.000.000.000,00 (seratus milyar rupiah)			
		apabila ini pekerjaan kompleks, maka PPK diminta untuk melampirkan surat penetapan pekerjaan kompleks dari PA/KPA			
		B Memastikan bahwa PPK telah menetapkan Rancangan kontrak (pokja pemilihan memastikan rancangan kontrak yang terdiri dari draft kontrak, syarat-syarat umum dan syarat-syarat khusus kontrak telah sesuai ketentuan dalam perlem 12 tahun 2021 dan syarat-syarat khusus telah diisi)	2 Apakah PPK telah menetapkan rancangan kontrak dan telah menguploadnya di dalam sistem SPSE dan telah apakah syarat-syarat khusus kontrak telah diisi semuanya?	POKJA MEMINTA LEMBARAN PENETAPAN RANCANGAN KONTRAK OLEH PPK	Akan dilengkapi dan disampaikan dalam sistem SPSE
		C Memastikan bahwa PPK telah menetapkan spesifikasi pekerjaan yang terdiri dari : Metode Pelaksanaan : Jadwal waktu pelaksanaan: Persyaratan Bahan: Persyaratan Peralatan: Pengendalian Mutu: Cara pengukuran dan pembayaran.	1 Untuk Nilai HPS di bawah Rp. 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar): Metode pelaksanaan menjadi pedoman penyedia untuk melaksanakan pekerjaan	Perpres 16 Tahun 2018 dan Perubahannya Perpres 12 Tahun 2021, Perpres 46 Tahun 2025, Perlem LKPP No 12 Tahun 2021	Metode Pelaksanaan sudah diberikan dalam spesifikasi teknis pekerjaan: jadwal waktu pelaksanaan belum disampaikan dalam sistem
		a metode pelaksanaan			
		b pokja memastikan bahwa ppk telah mengupload jadwal waktu pelaksanaan	POKJA MEMINTA LEMBARAN PENETAPAN SPESIFIKASI TEKNIS OLEH PPK	Akan dilengkapi dan disampaikan dalam sistem SPSE	

No	TAHAPAN	REVISI POKJA PEMILIHAN	PERTANYAAN POKJA KE PPK	REGULASI	PENDAPAT PPK
2	b	semaksimal mungkin diupayakan menggunakan standar nasional Indonesia	standar apakah yang digunakan oleh PPK dalam menyusun spesifikasi teknis ini? Apakah ada standar Indonesia (SNI) tolong disebutkan.		
			Apakah PPK dalam menyusun spesifikasi telah memperhitungkan pemenuhan TKDN produk yang disyaratkan? dan apakah telah mengeceknya pada sistem Kemempertin pada http://tkdn.kemempertin.go.id/?		SUDAH DIPERHITUNGKAN DALAM HPS DAN SPESIFIKASI
			Apakah PPK sudah mengidentifikasi peralatan yang akan dikompetisikan dalam pemilihan dan peralatan yang menjadi persyaratan untuk pelaksanaan pekerjaan	Perlem LKPP No 12 Tahun 2021 menyatakan : 1. Untuk Nilai HPS di bawah 100 milyar disyaratkan paling banyak 6 jenis peralatan dan masing-masing jenis maksimal 3 unit; 2. Untuk Nilai HPS di atas 100 milyar disyaratkan paling banyak 10 jenis peralatan dan masing-masing jenis maksimal 3 unit;	telah diidentifikasi dan jumlah serta jenis peralatan akan dilakukan penyusunan jumlah peralatan dan kapasitas akan disesuaikan
1		mencantumkan macam, jenis, kapasitas, dan jumlah peralatan utama minimal yang diperlukan dalam pelaksanaan pekerjaan	Apakah PPK telah mencantumkan secara jelas macam, jenis, kapasitas dan jumlah peralatan yang dibutuhkan untuk penyelesaian pekerjaan? ** untuk kapasitas harus dengan angka pasti (contoh dump truck kapasitas 4,5 ton - tidak lagi dengan range 4,5 - 6 ton)		
			Apakah peralatan yang disyaratkan sudah membedakan antara peralatan konstruksi (LMP, Excavator, Loader, dll..) dan peralatan bangunan (Kereta dorong, alat pertukangan, dll..)	Pokja Pemilihan memastikan bahwa kapasitas peralatan disebut tidak dengan range (akan berpengaruh terhadap evaluasi peralatan)	YA, sudah dibedakan
			Mengacu pada perlem LKPP nomor 12 Tahun 2021 apakah PPK dalam menyusun kebutuhan peralatan telah memisahkan antara peralatan yang dikompetisikan dengan yang menjadi peralatan kerja di lapangan?		YA, sudah diidentifikasi kebutuhannya dan akan dilakukan penyusunan abtbat adanya perbedaan jenis peralatan pada spesifikasi dan lek
3		Spesifikasi Proses Kegiatan	Berapa jumlah peralatan yang disyaratkan oleh PPK? berapa unit yang disyaratkan untuk masing-masing peralatan?		
			Apabila ada perbedaan persyaratan PPK dengan ketentuan Perlem LKPP Nomor 12 Tahun 2021, PPK agar menyerahkan surat persetujuan penambahan persyaratan		
			Apabila ada penambahan persyaratan, Apakah Penambahan persyaratan kualifikasi Penyedia dan persyaratan teknis tidak bertentangan dengan prinsip pengadaan, etika pengadaan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku?		
3		menentukan uraian pekerjaan, identifikasi bahaya, dan penetapan risiko terkait Keselamatan Konstruksi pada Pekerjaan Konstruksi.	Apakah PPK sudah melakukan identifikasi bahaya dan apakah PPK telah menetapkan resiko atas pekerjaan ini? ** resiko pada pekerjaan konstruksi akan berpengaruh terhadap penilaian kompleks tidaknya suatu pekerjaan konstruksi	Perlem LKPP No 12 Tahun 2021: Peraturan Menteri PU/PR Nomor 10 Tahun 2021	YA, sudah dilakukan identifikasi bahaya, dan sudah dilakukan penetapan resiko DOKUMEN RKK IBPPR AKAN DILENGKAPI DAN DIUPLOAD DALAM SISTEM
			Apakah instrumen identifikasi bahaya dan penilaian resiko PPK sudah mengacu pada peraturan yang berlaku Peraturan Menteri PU/PR Nomor 10 Tahun 2021 tentang PEDOMAN SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN KONSTRUKSI		YA, sudah sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri PU/PR Nomor 10 Tahun 2021 tentang PEDOMAN SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN KONSTRUKSI

No	TAHAPAN	REVISI POKJA PEMILIHAN	PERTANYAAN POKJA KE PPK	REGULASI	PENDAPAT PPK
4	Spesifikasi Metode Konstruksi / Metode Pelaksanaan / Metode Kerja 1 Konstruksi yang dibutuhkan	metode konstruksi/metode pelaksanaan /metode kerja harus logis, realistis, aman, berkeselamatan, dan dapat dilaksanakan	Apakah PPK dalam menyusun spesifikasi telah berpedoman pada ruang lingkup pekerjaan yang dibutuhkan?	Perlem LKPP No. 12 Tahun 2021 Bab III Instruksi Kepada Peserta	YA , penyusunan spesifikasi sudah sesuai dan berpedoman pada ruang lingkup pekerjaan yang dibutuhkan.
			Sesuai ketentuan, metode pelaksanaan untuk segmentasi usaha kecil dan menengah kecuali untuk pekerjaan kompleks atau usaha besar, tidak dikompertiskan. Metode pelaksanaan harus ditetapkan oleh PPK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kontrak		Metode Pelaksanaan tidak diperlukan
			Apakah dalam menyusun spesifikasi teknis ini PPK telah menyusun metode kerja sesuai dengan kebutuhan pekerjaan dan apakah sudah meliputi semua jenis pekerjaan?		Metode Pelaksanaan tidak diperlukan
			Apakah PPK sudah mengupload metode pelaksanaan?		Metode Pelaksanaan tidak diperlukan
			Apakah dalam menyusun spesifikasi teknis, PPK telah memperhitungkan waktu pelaksanaan dan apakah telah dituangkan didalam metode pelaksanaan pekerjaan waktu pelaksanaan pekerjaannya?		Jadwal waktu pelaksanaan tidak diperlukan
			Apakah PPK telah mencantumkan syarat bahan yang digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan?		SUDAH SEMUANYA , syarat bahan dijabarkan dalam Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS)
			Apakah PPK telah mencantumkan syarat pengujian bahan dan hasil produk? * contoh beton K-250 standar pengujian seperti apa yang diinginkan oleh PPK untuk mengetahui bahwa syarat beton K-250 tersebut telah terpenuhi		Tidak diperlukan untuk pengujian material
			Apakah PPK telah mencantumkan kriteria kinerja produk pada spesifikasi yang dibuat? ** contoh umur dan bangunan konstruksi yang diharapkan		YA , sudah diperhitungkan dan akan dilengkapi pada spesifikasi teknis yang dibuat
			Apakah PPK telah mendefinisikan dengan jelas tata cara pengukuran untuk pembayaran atas pekerjaan yang telah dikerjakan oleh penyedia?		SUDAH ADA , syarat pengukuran dan pembayaran sudah dijabarkan dalam spesifikasi teknis
			Apakah PPK dalam menyusun metode kerja telah menyesuaikan dengan spesifikasi atau volume pekerjaan?		YA , syarat bahan sudah dijabarkan dalam spesifikasi teknis
	Kesesuaian antara metode kerja dengan spesifikasi/volume pekerjaan yang disyaratkan	Kesesuaian antara metode kerja dengan peraturan utama yang ditawarkan/ dipertikan dalam pelaksanaan pekerjaan	Apakah PPK dalam menyusun metode kerja telah menyesuaikan dengan kebutuhan peraturan utama?		YA, TELAH DILAKUKAN PENYESUAIAN , kebutuhan peraturan akan dilakukan penyesuaian
			Sesuai dengan nilai HPS paket, Paket pekerjaan ini masuk dalam segmentasi usaha kecil		
			5 Spesifikasi Jabatan Kerja Konstruksi		
			1 Segmentasi Usaha Kecil		
			a Untuk pekerjaan kualifikasi usaha kecil personel managerial yang disyaratkan meliputi jabatan Pelaksana dan Petugas Keselamatan Konstruksi/3/Ahli Keselamatan Konstruksi		SUDAH DILAKUKAN PENYESUAIAN , Untuk personel managerial akan dilakukan penyesuaian
			2 Segmentasi Usaha Menengah dan Besar		
			b Untuk pekerjaan kualifikasi usaha menengah dan besar personel managerial yang disyaratkan meliputi jabatan: Manajer Pelaksanaan/Proyek, Manajer Teknik, Manajer Keuangan, dan Ahli K3 Konstruksi / Ahli Keselamatan Konstruksi		AKAN DILAKUKAN PENYESUAIAN , Untuk personel managerial akan dilakukan penyesuaian
			mencantumkan kriteria kinerja produk (<i>output performance</i>) yang diinginkan		
			mencantumkan tata cara pengukuran dan tata cara pembayaran		
			jangka waktu pelaksanaan harus sesuai dengan metode pelaksanaan		

No	TAHAPAN	REVIU POKJA PEMILIHAN	PERTANYAAN POKJA KE PPK	REGULASI	PENDAPAT PPK
		a Untuk tender pekerjaan konstruksi dengan nilai HPS di atas Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah), manajer teknis disyaratkan paling banyak 2 (dua) personel; dan b Untuk tender pekerjaan konstruksi dengan nilai HPS di atas Rp100.000.000.000,00 (sepuluh puluh miliar rupiah) manajer teknis disyaratkan paling banyak 3 (tiga) personel Hanya mensyaratkan 1 (satu) sertifikat kompetensi kerja (SKA/SKT) untuk setiap personel manajer yang disyaratkan, kecuali untuk manajer keuangan tidak mensyaratkan sertifikat kompetensi kerja Untuk sertifikat Petugas Keselamatan Konstruksi atau sertifikat Ahli K3 Konstruksi/Ahli Keselamatan Konstruksi, tidak boleh dibatasi hanya yang diterbitkan oleh salah satu lembaga sertifikasi profesi atau instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan kualifikasi Usaha Kecil tidak mensyaratkan SKA, kecuali SKA Ahli K3 Konstruksi/Ahli Keselamatan Konstruksi kualifikasi Usaha Menengah dan Usaha Besar tidak mensyaratkan SKT a Petugas Keselamatan Konstruksi/3/Ahli Keselamatan Konstruksi Risiko keselamatan konstruksi kecil; mensyaratkan Petugas Keselamatan Konstruksi tanpa syarat pengalaman: - Risiko keselamatan konstruksi sedang (1) Ahli Muda K3 Konstruksi/Ahli Muda Keselamatan Konstruksi dengan pengalaman 3 (tiga) tahun; atau (2) Ahli Utama K3 Konstruksi/Ahli Utama Keselamatan Konstruksi tanpa syarat pengalaman; - Risiko keselamatan konstruksi besar (1)Ahli Utama K3 Konstruksi/Ahli Utama Keselamatan Konstruksi dengan pengalaman 3 (tiga) tahun; atau (2) Ahli Utama K3 Konstruksi/Ahli Utama Keselamatan Konstruksi tanpa syarat pengalaman; dan b Persyaratan pengalaman untuk personel manajer selain Petugas Keselamatan Konstruksi/Ahli K3 Konstruksi/Ahli Keselamatan Konstruksi - Untuk tender pekerjaan konstruksi kualifikasi usaha kecil dengan nilai HPS paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah), pengalaman yang disyaratkan paling lama 2 (dua) tahun	c Apakah ada perbedaan antara persyaratan sesuai ketentuan Perlem 12 LKPP tahun 2021 dengan persyaratan PPK? d Apakah ada persyaratan memiliki lebih dari 1 SKA atau SKT? Bila ada, Apa alasannya? Apakah manajer keuangan disyaratkan sertifikat kompetensi kerja? Bila ada, Apa alasannya? Apakah Petugas Keselamatan Konstruksi atau sertifikat Ahli K3 Konstruksi/Ahli Keselamatan Konstruksi dibatasi untuk diterbitkan oleh lembaga sertifikasi profesi tertentu? Bila ada, Apa alasannya? Apakah persyaratan pengalaman Petugas Keselamatan Konstruksi/3/Ahli Keselamatan Konstruksi sudah sesuai ketentuan?	TIDAK ADA PERBEDAAN, Untuk personil manajer akan dilakukan penyesuaian TIDAK DISYARATKAN TIDAK DIBATASI SUDAH DILAKUKAN PENYESUAIAN, Untuk personil K3 akan dilakukan penyesuaian sesuai dengan resiko pekerjaan SUDAH DILAKUKAN PENYESUAIAN, Untuk personil manajer akan dilakukan penyesuaian	

No	TAHAPAN	REVISI POKJA PEMILIHAN	PERTANYAAN POKJA KE PPK	REVISI	PENDAPAT PPK
		- Untuk tender pekerjaan konstruksi kualifikasi j untuk menengah dengan nilai HPS paling banyak Rp50.000.000.000 (lima puluh miliar rupiah), pengalaman yang disyaratkan paling lama 4 (empat) tahun - Untuk tender pekerjaan konstruksi kualifikasi 3 usaha besar dengan nilai HPS paling sedikit di atas Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah), pengalaman yang disyaratkan paling lama 5 (lima) tahun - Untuk tender pekerjaan konstruksi kualifikasi usaha besar dengan nilai HPS di atas Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah), pengalaman yang disyaratkan paling lama 8 (delapan) tahun - Untuk tender pekerjaan kompleks, pengalaman yang disyaratkan paling lama 10 (sepuluh) tahun	Apabila ada penambahan persyaratan, Apakah Penambahan persyaratan kualifikasi Penyedia dan persyaratan teknis tidak bertentangan dengan prinsip pengadaan, etika pengadaan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku? apakah PPK dalam menyusun spesifikasi telah mempertimbangkan ketersediaan penyedia yang mampu melaksanakan pekerjaan ini?		YA, sudah dipertimbangkan penyedia yang mampu melaksanakan pekerjaan ini, ada penyedia yang mampu melaksanakan pekerjaan ini berdasarkan identifikasi kami
		B Detail Engineering Desain (DED) 1 Memastikan bahwa PPK telah menetapkan DED untuk pelaksanaan pekerjaan 2 Memastikan bahwa gambar sudah sesuai 2 dengan ruang lingkup pekerjaan 3 Memastikan bahwa HPS yang ditetapkan disusun berdasarkan estimasi biaya/ RAB 4 Memastikan spesifikasi yang ditetapkan sudah mengacu pada RKS Rolra pemilihan mutu kembali dokumen persiapan pengadaan PPK terhadap peraturan HPS	1 Apakah spesifikasi teknis yang disusun dan ditetapkan sudah mengacu pada DED? 2 Apakah ada penyusunan gambar DED pada persiapan pengadaan? 3 Apakah HPS yang ditetapkan disusun berdasarkan estimasi biaya/ RAB 4 Apakah spesifikasi yang ditetapkan sudah mengacu pada RKS		YA, sudah mengacu pada DED TIDAK ADA perubahan gambar pada persiapan pengadaan YA, HPS ditetapkan berdasarkan estimasi biaya atau RAB oleh konsekuensi perencanaan YA, spesifikasi yang ditetapkan mengacu pada RKS
iii	Revisi HPS	1 Sesuai ketentuan, HPS disusun berdasarkan hasil perhitungan biaya satuan oleh konsultan perencana (engineer's estimate atau EE) berdasarkan DED 2 Apakah harga satuan yang diinput dalam EE dan ditetapkan menjadi HPS mewakili harga yang berlaku di pasaran saat ini? 3 Apa dasar PPK dalam menetapkan HPS saat ini? ditanyakan apabila ada barang yang disadkan dan tidak menjadi bagian dari komponen pekerjaan konstruksi (mesin pabrik, barang furniture, dll) a Apakah barang yang disadkan telah dilakukan survey tersendiri? b Proses survey terhadap barang tersebut apakah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku? c apakah telah dilakukan survey minimal kepada paling kurang kepada 3 penyedia barang atau apakah barang tersebut memiliki hak paten? d apakah telah dilakukan perhitungan TKDN terhadap barang yang disurvey	1 Apakah EE yang menjadi dasar peraturan HPS telah di susun dengan benar sesuai dengan DED? 2 Apakah harga satuan yang diinput dalam EE dan ditetapkan menjadi HPS mewakili harga yang berlaku di pasaran saat ini? 3 Apa dasar PPK dalam menetapkan HPS saat ini?		YA, EE yang menjadi dasar peraturan HPS telah di susun dengan benar sesuai dengan DED YA, harga satuan yang diinput dalam EE dan ditetapkan menjadi HPS mewakili harga yang berlaku di pasaran saat ini Dasar penetapan HPS adalah hasil perencanaan, survey harga pasar, standar harga kabupaten/kota, dan ada didokumentasikan

No	TAHAPAN	REVISI POKJA PEMILIHAN	PERTANYAAN POKJA KE PPK	REGULASI	PENDAPAT PPK
			- apakah telah dilakukan survey terkait kemudahan proses klaim apabila ada kerusakan? - apakah telah dilakukan survey terkait kemudahan mendapatkan suku cadang? - apakah telah dilakukan survey terkait kemudahan melakukan maintenance? - Apakah disediakan layanan pelatihan bagi operator peralatan dan teknis untuk maintenance? - saat melakukan survey apakah disediakan buku petunjuk operasi peralatan, petunjuk maintenance, dan buku operasional lainnya dalam bahasa Indonesia dan mudah dimengerti?	- - - -	
			ditanyakan apabila ada barang yang diadakan konstruksi, contoh lift, eskalator, panel ACf, ... dll		
			a. Apakah barang yang diadakan telah dilakukan survey tersendiri? b. Proses survey terhadap barang tersebut apakah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku?	 	
			- apakah telah dilakukan survey minimal kepada paling kurang kepada 3 penyedia barang atau apakah barang tersebut memiliki hak paten? - apakah telah dilakukan perhitungan TKDN terhadap barang yang disurvei - apakah telah dilakukan survey terkait kemudahan proses klaim apabila ada kerusakan?	 	
			- apakah telah dilakukan survey terkait kemudahan mendapatkan suku cadang? - apakah telah dilakukan survey terkait kemudahan melakukan maintenance? - Apakah disediakan layanan pelatihan bagi operator peralatan dan teknis untuk maintenance?	 	
			- Apakah disediakan buku petunjuk operasi peralatan, petunjuk maintenance, dan buku operasional lainnya dalam bahasa Indonesia dan mudah dimengerti?		
			Apakah pekerjaan ini termasuk pekerjaan Terintegrasi		bukan merupakan pekerjaan terintegrasi
		Pengadaan Barang/Jasa yang dilakukan secara terintegrasi, jaminan Penawaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) besarnya antara 1% (satu persen) hingga 3% (tiga persen) dari nilai Page Anggaran.			
			a. Apakah penyusunan HPS untuk pekerjaan non konstruksi telah sesuai ketentuan yang berlaku dan apakah harga tersebut sudah memperhitungkan pajak, keuntungan, biaya lain-lain termasuk didalamnya biaya pengurusan, pengepakan, pemuatan/pemindahan?		
			b. Apakah HPS untuk pekerjaan non konstruksi tersebut sudah mewakili harga yang berlaku di pasaran saat ini?		
			c. Apakah PPK telah mengadministrasikan atau melakukan backup terhadap komponen-komponen penyusun HPS non konstruksi tersebut?		

No	TAHAPAN	REVIU POKJA PEMILIHAN	PERTANYAAN POKJA KE PPK	REGULASI	PENDAPAT PPK
		2 Backup data penyusunan HPS baik HPS konstruksi maupun HPS non konstruksi sesuai ketentuan boleh ditunjukkan ataupun tidak ditunjukkan, apabila tidak ditunjukkan polya pemilihan menginput dalam B3 bahwa Back Up data penyusunan HPS tidak ditunjukkan 3 Memastikan bahwa HPS masih berlaku 28 (dua puluh delapan hari) sebelum batas akhir penyampaian dokumen penawaran untuk pemilihan pascakualifikasi 4 Memastikan bahwa harga dasar Upah sudah sesuai dengan Upah Minimum yang berlaku 5 Memastikan apakah biaya K3 telah dimasukkan dalam HPS	4 Apakah kepada pokja pemilihan dapat ditunjukkan Backup data penyusunan HPS? 5 Apakah perencanaan HPS yang telah diupload di sistem masih berlaku sampai dengan batas akhir penyampaian dokumen penawaran? 6 Untuk kepentingan klarifikasi kewajaran harga, apakah Upah pekerja konstruksi sudah memenuhi ketentuan UMR? 7 Apakah biaya K3 sudah dimasukkan dalam HPS? Dan apakah kebutuhan K3 sudah ditinci ? Sesuai ketentuan dalam Permenn PU/PPR Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi		PPK TIDAK MEMBAWA BACK UP DATA PENYUSUNAN HPS SEHINGGA TIDAK DITUTUHKAN KEPADA POKJA PEMILIHAN YA, Penyusunan HPS sudah memperhatikan UMR YA, Sudah dimasukkan dalam HPS
iv					
3.	Reviu Penetapan Rancangan Kontrak	Pokja pemilihan meriviu kembali dokumen persiapan pengadaan PPK terhadap Rancangan kontrak			
		1 Memastikan jenis kontrak yang sudah diterapkan 2 Memastikan klausul denda pekerjaan 3 Memastikan pemberian uang muka 4 Memastikan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan 5 Untuk pekerjaan sampai dengan 50 Milyard, PPK membuat jangka waktu pelaksanaan dan tidak dikompetsikan. 6 Untuk pekerjaan diatas 50 Milyard, PPK membuat jangka waktu pelaksanaan dan jangka waktu pelaksanaan dikompetsikan 5 Memastikan cara pembayaran 6 Memastikan sub penyedia dan KSO a KSO tidak berlaku pada pemilihan dengan segementasi usaha kecil b Sub penyedia diberlakukan untuk pekerjaan diatas 25 Milyard 7 Memastikan penyelesaian permasalahan kontrak	1 Sesuai dengan jenis kontrak yang diinput pada sistem, apakah sudah sesuai? Dan apakah jenis kontrak yang terdapat dan SSUK dan yang diinput dalam sistim sudah sesuai? 2 Apakah denda pekerjaan untuk paket pekerjaan ini berlaku senilai kontrak ataupun perbagian pekerjaan? 3 Apakah pekerjaan ini diberikan uang muka? Berapa persen? 4 Apa Persyaratan pengajuan uang muka dan termin sudah dimasukkan dalam SSKK? 5 Apakah dalam merencanakan pekerjaan ini, waktu pelaksanaan pekerjaan sudah diidentifikasi PELAKSANAAN DITETAPKAN SELAMA 120 HARI KALENDER PHO? 6 Apakah schedule pelaksanaan telah dibuat dan telah diupload oleh PPK? 7 Sistem pembayaran apa yang digunakan untuk deribayaan beket pekerjaan ini? 8 Apakah persyaratan Sub penyedia dan KSO berlaku untuk pekerjaan ini? 9 apabila ada perselisihan dalam kontrak, akan ditempuh lewat?	WAKTU PELAKSANAAN DALAM JADWAL PELAKSANAAN DITETAPKAN SELAMA 120 HARI KALENDER SUDAH DIDENTIFIKASI DAN SUDAH SESUAI KEBUTUHAN PEKERJAAN BELUM DIUPLDAD Sistem pembayaran SEKALIGUS TIDAK BERLAKU	JENIS KONTRAK YANG DIGUNAKAN ADALAH GABUNGAN LUMPSUM DAN HARGA SATUAN denda pekerjaan TERHADAP BAGIAN PEKERJAAN YA, DIBERIKAN UANG MUKA sesuai besaran yang ditentukan dalam SSKK YA, persyaratan pengajuan uang muka dan termin sudah dimasukkan Apabila ada perselisihan, akan ditempuh melalui Lps IKPP

No	TAHAPAN	REVIU POKJA PEMILIHAN	PERTANYAAN POKJA KE PPK	REGULASI	PENDAPAT PPK
		8 Memastikan masa pemeliharaan	10 Berapa lama waktu pemeliharaan ?		Waktu pemeliharaan selama 365 Hari Kalender
		9 Memastikan surat perjanjian SSUK dan SSKK sudah terisi	11 Apakah SSKK telah diisi semua datanya dan apakah SSKK yang diinput telah berpedoman pada SSKK lampiran Perlem 12 LKPP Tahun 2021	BERBERAPA ITEM BELUM DIISI DALAM SSKK	Sudah diinput semuanya
		10 Memastikan persyaratan kontrak lainnya yang tidak menjadi ketentuan dalam dokumen pemilihan	12 Apakah PPK telah memastikan bahwa semua persyaratan dalam SSUK yang dibuat dapat dipahami oleh semua penyedia		YA , semua persyaratan yang dimuat dalam SSUK akan mudah dimengerti oleh semua penyedia
			13 Apa persyaratan kontrak yang dibuat tidak bertentangan dengan aturan yang berlaku		YA , tidak ada syarat yang bertentangan dengan aturan yang berlaku
			14 Apakah ada persyaratan kontrak lainnya terkait kemampuan keuangan?		Tidak ada persyaratan lainnya terkait kemampuan keuangan
			15 Apakah semua informasi tentang SSUK telah disampaikan kepada Pokja Pemilihan?		YA , semua informasi sudah disampaikan
V	Reviu Dokumen Anggaran Belanja (DIPA/DPA atau RKA-KL/RKA-PD yang telah ditetapkan	Pokja Memastikan Dokumen Anggaran Belanja (DIPA/DPA atau RKA-KL/RKAPD yang telah ditetapkan) untuk memastikan bahwa anggaran untuk pekerjaan yang akan dilaksanakan telah tersedia dan jumlahnya cukup			
		1 Memastikan bahwa kode rekening DPA sesuai dengan nama Paket pengadaan (hal ini perlu dipastikan apabila ada pekerjaan konsolidasi)	1 Apakah kode rekening yang ada dalam DPA sesuai dengan kode rekening untuk paket pekerjaan ?		YA , kode rekening sudah sesuai
		2 Memastikan apakah DPA sudah disahkan	2 Pekerjaan ini menggunakan anggaran APBD atau APBN, apakah anggaran ini sudah di sahkan?		pekerjaan ini menggunakan anggaran APBD (DAU SQ), dan anggaran pekerjaan ini sudah disahkan
		3 Memastikan apakah pekerjaan ini termasuk pekerjaan bersyarat	3 Apakah dalam pelangan ini termasuk pekerjaan bersyarat? Apakah harus ada surat pernyataan dll...? (bila anggaran masih dibentengi atau karena sebab tertentu akan terjadi rasionalisasi)		TIDAK BERSYARAT
VI	Reviu ID paket RUP untuk memastikan	1 memastikan ID Paket RUP sudah sesuai dan diumumkan dalam sirup	1 Apakah nama paket pekerjaan yang ada dalam SIRUP sudah sama dengan paket pekerjaan dalam Dokumen DPA		YA , Sudah Sama
VII	Analisis Pasar	1 berdasarkan dokumen persiapan pengadaan yang diserahkan oleh PPK, Pokja Pemilihan melakukan analisis pasar untuk mengetahui kelayakan ketersediaan barang/jasa dan Pelaku Usaha dalam negeri yang mampu dan memenuhi persyaratan untuk melaksanakan pekerjaan. Hasil analisis pasar digunakan untuk menentukan metode kualifikasi dan/atau metode pemilihan Penyedia. Dalam hal, hasil analisis pasar diketahui tidak ada Pelaku Usaha dalam negeri yang mampu dan memenuhi persyaratan untuk melaksanakan pekerjaan maka Pokja Pemilihan mengusulkan dan meminta persetujuan kepada PPK untuk dilaksanakan melalui Tender/Seleksi Internasional	1 Apakah PPK sudah mengidentifikasi ketersediaan pelaku usaha dalam yang mampu melaksanakan pekerjaan ini		YA , Sudah diidentifikasi ketersediaan penyedia yang mampu melaksanakan pekerjaan ini
			2 Apakah PPK telah melaksanakan analisis pasar tentang ketersediaan material dan peralatan lainnya?		YA , Sudah dilakukan analisis pasar
IX	Waktu Pengadaan Barang / Jasa	1 memastikan bahwa pelaksanaan barang/jasa sejak proses persiapan, pemilihan dan pelaksanaan kontrak dapat sesuai rencana pengadaan dan pemanfaatan barang/jasa	1. Apakah Rencana Pengadaan Barang dan Jasa yang diinput pada RUP sudah sesuai dengan perjanjian waktu pelaksanaan oleh PPK?		Sudah sesuai

No	TAHAPAN	REVIU/ POKJA PEMULIHAN	PERTANYAAN POKJA KE PPK	REGULASI	PENDAPAT PPK
----	---------	------------------------	-------------------------	----------	--------------

PERSYARATAN KUALIFIKASI

No	URAIAN	PENJELASAN PPK
1	SBU/ NIB Yang Dipersyaratkan	SBU yang disyaratkan untuk paket pekerjaan ini adalah : SBU KT007/ KBLI 43304
2	KSO	Apakah dalam pekerjaan ini diperbolehkan melakukan KSO? Sesuai ketentuan Kso tidak diperlakukan untuk segmentasi usaha kecil. Tidak
3	Perpajakan	Sesuai aturan perpajakan, dimana akhir pembayarannya pada tahun sebelumnya paling lambat dilakukan pada bulan April tahun berjalan maka dipersyaratkan tahun pajak terakhir adalah : Tahun Pajak 2024
4	Data Lainnya	Apakah kualifikasi penyedia yang disyaratkan dalam pelaksanaan pekerjaan ini sudah di sampaikan semuanya didalam KAK/ Spesifikasi Teknis? sudah disampaikan dalam spesifikasi teknis

Catatan:

- 1
- 2
- 3

Tanggapan PPK

- 1
- 2
- 3

Catatan :
Dari hasil rewu datas, disimpulkan bahwa :

- 1 TIDAK ADA
- 2 terdapat dokumen yang belum lengkap (lembaran penetapan HPS/ Penetapan Rancangan Kontrak/ Penetapan Spesifikasi Teknis) dan lain-lain dan PPK akan segera melengkapinya pada tanggal : 14 Juli 2025

	Nama	Tanda Tangan
1 Pejabat Pembuat Komitmen	Agripa Kurnegon, A.Md.	
2 Konsultan Perencana	Grane CH Radja	
3 Pokja Pemilihan	Nama Anwar Hartjuna, S.Si. Boby L. Da Costa, S.Kom., M.M. Yustin E. Toke, S.T. Kornelis K. Bolen, S.E., MAK. Rivantis Foyh, S.Kom.	



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIAT DAERAH
Jalan Raya El Tari Nomor 52 Telepon 0380 - 833341, 829283
KUPANG

DAFTAR HADIR

Kegiatan : Kaji Ulang Paket Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor
(Renovasi Gedung-Renovasi Ruang IGD Mennjadi Ruang Tim
Layanan Jaminan Kesehatan
Hari/Tanggal : Senin, 17 Juni 2025
Waktu : 10.00 Wita - Selesai
Tempat : Biro Pengadaan Barang/Jasa Setda Provinsi NTT

NO	NAMA	JABATAN	INSTANSI	TANDA TANGAN
01.	Agripa Kamugon	PPK	Rsub Johannes	Adun
02	Marianus Kopong Solot	PP	Rsub Johannes	Ami
03	GRAME CH RADJA	Konsultan Perencana	CV. INTERNAL TEKNIK	
04.	FREDERIK KILU	Kabag I	BIRO PBJ	
05.	KORNELIS K. BOLAN	Poljes	BIRO PBJ	
06.	RIVAN FOYH	POLJA	BIRO PBJ	
07	Yusbn Toka	Poljes	BIRO PBJ	
8	Amvar Harijana	Polmil	- n -	

Kegiatan : **DAFTAR HADIR**
Reviu Paket Petyaraan Renovasi IGD

Hari/tanggal : Senin / 14 Juli 2025

Jam : 10.00 - selesai

Tempat : Ruang Rapat Bag. I Biro PBJ Provinsi NTT

[illegible]